

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

Oleh:
Ronggo Warsito *

Abstrak, Multikulturalisme sebagai sebuah terminologi yang relatif baru hadir dalam wacana yang mendunia saat ini. Dalam perkembangannya multikulturalisme tidak lebih dari sebuah istilah yang menyempurnakan gagasan sebelumnya yaitu pluralisme.

Multikultural dalam perspektif bangsa Indonesia bukan sesuatu yang mengherankan. Karakter dan pribadi bangsa Indonesia sudah terbiasa dengan keragaman yang luar biasa dari bumi Nusantara ini. Multikultur bukan sesuatu yang baru karena doktrin dan peradaban Islam telah mempresentasikannya bagaimana umat Islam dengan bimbingan wahyu harus bersikap.

Keragaman umat manusia dipandang menjadi penyebab terjadinya penderitaan dan kesengsaraan. Pertikaian dan peperangan yang ada dipandang sebagai akibat dari keragaman ini yang melahirkan pendangkalan sikap umat manusia terhadapnya. Maka para pakar menganggap bahwa kesadaran multikultur harus ditanamkan dan menjadi bagian dari kesadaran umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk menanamkan kesadaran tersebut diperlukan sebuah metoda yang efektif. Pendidikan pada akhirnya dianggap sebagai solusi untuk hal ini.

Kata Kunci, Multikulturalisme dan Pendidikan

Pendahuluan

Multikulturalisme sebagai sebuah fenomena yang relatif baru dalam terminologi ilmiah. Maka tak heran jika istilah tersebut populer di kehidupan sehari-hari meskipun terkadang masih banyak sesungguhnya yang tidak paham makna serta arti dari term tersebut. Untuk kesadaran yang dibangun dari sebuah pemahaman diperlukan bingkai pendidikan sebagai media transformasi budaya dan nilai.

* Dosen Fakultas Tarbiyah IAIT Kediri

Agama adalah sebuah fenomena yang kaya sekaligus sangat kompleks. Ia (agama) mengandung berbagai dimensi: *ritual, doktrinal, etikal, sosial* dan *experiensial*. Begitu pulalah halnya dengan Islam sebagai agama, dimana telah diyakini bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna. Bertitik tolak dari keimanan ini kita menyakini pula bahwa Islam adalah cara pandang hidup (*way of life*) yang total dan padu menawarkan landasan moral dan etis bagi pemecahan semua masalah kehidupan; Islam adalah din (agama), dunya (dunia) dan daulah (negara/politik); Islam adalah sistem keyakinan dan sistem hukum ('*aqidah wa syara'*ah); dan sebagai agama yang sempurna yang didesain Tuhan sampai akhir zaman.

Atas dasar realitas Islam yang kompleks tersebut maka Hajriyanto Y. Tohari, membahasakan bahwa Islam adalah risalah yang universal (untuk semua manusia) yang pasti relevan bagi setiap perkembangan zaman dan tempat (*shalih li-kulli zaman wa makan*), mondial (untuk seantero dunia) dan eternal (sampai akhir zaman).¹ Pada pandangan yang lain, agama merupakan gejala sosial yang ada dan berkembang setua perkembangan masyarakat itu sendiri. Setiap masyarakat memiliki motif untuk beragama atau naturaliter religioosa, sebagai manifestasi dari fitrah manusia yang membutuhkan tuntunan dalam memecahkan problematikanya. Maka beragama berarti pengakuan akan keterbatasan, sekaligus ketundukan masyarakat pada seperangkat nilai transedental (bukan nilai yang profan).²

Demikian halnya dengan Islam di Indonesia sebagai kekuatan mayoritas telah menunjukan peran nyata dalam sejarah yang panjang tidak saja secara historis (hal itu terbukti sejak masa pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia) tetapi juga secara sosiologis Islam berperan aktif dalam proses pemberdayaan masyarakat yang berlangsung terus-menerus. Proses tersebut berjalan mengikuti irama kehidupan yang wajar sesuai tuntunan dinamika masyarakat.

Sekian lama perjalanan agama Islam “yang multidimensi” dan perkembangan pemikiran para pemikir Islam telah mengalami berbagai macam perubahan dan penyesuaian baik secara evolusi atau revolusi, maupun secara struktural atau cultural yang jika

¹ Harjiyanto Y. Tohari, *Islam dan Realitas Budaya*, (Jakarta: Media Cita, 2000), h. 301.

² M. Deden Ridwan, *Membangun Kerukunan Teologi; Kehampaan Spiritual Masyarakat Indonesia*, (Jakarta:Media Cita, 2000), h. 71

dipetakan dalam pola-pola pemikirannya dapat dikategorikan dalam pola pemikiran Islam tradisionalisme, modernisme, dan fundamentalisme yang sudah barang tentu kesemuanya ditujukan dan bertujuan dalam rangka mengagungkan *dienul Islam*.

Makna Multikulturalisme

Secara etimologi multikulturalisme berasal dari kata “multi” yang berarti plural, dan “Kultural” berarti kultur atau budaya, sedangkan “isme” berarti paham atau aliran. Jadi multikulturalisme secara sederhana adalah paham atau aliran tentang budaya yang plural. Pengertian yang lebih mendalam istilah multikulturalisme bukan hanya sekedar pengakuan terhadap budaya (kultur) yang beragam, melainkan pengakuan yang memiliki implikasi-implikasi politis, sosial, ekonomi dan lainnya.

Perkembangan gagasan multikulturalisme menjadi sebuah gagasan yang dipandang perlu untuk dipromosikan sehingga menjadi bagian dalam tradisi masyarakat global. Tak heran jika berikutnya gagasan ini menggelinding pada arah munculnya gagasan baru yaitu “pendidikan multikulturalisme” dengan berbagai variannya.

Secara sederhana multikulturalisme berarti “keberagaman budaya”.³ Sebenarnya, ada tiga istilah yang kerap digunakan secara bergantian untuk menggambarkan masyarakat yang terdiri keberagaman tersebut baik keberagaman agama, ras, bahasa, dan budaya yang berbeda; yaitu pluralitas (*plurality*), keragaman (*diversity*), dan multikultural (*multicultural*). Ketiga ekspresi itu sesungguhnya tidak merepresentasikan hal yang sama, walaupun semuanya mengacu kepada adanya ‘ketidak-tunggalan’. Konsep pluralitas mengandaikan adanya ‘hal-hal yang lebih dari satu’ (*many*); keragaman menunjukkan bahwa keberadaan yang ‘lebih dari satu’ itu berbeda-beda, heterogen, dan bahkan tak dapat disamakan.

Secara konseptual terdapat perbedaan signifikan antara pluralitas, keragaman, dan multikultural. Inti dari multikulturalisme adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, jender, bahasa, ataupun agama. Apabila pluralitas sekadar merepresentasikan adanya kemajemukan (yang lebih dari satu), multikulturalisme memberikan penegasan bahwa dengan segala

³ Scott Lash dan Mike Featherstone (ed.), *Recognition And Difference: Politics, Identity, Multiculture* (London: Sage Publication, 2002), h. 34.

perbedaannya itu mereka adalah sama di dalam ruang publik. Multikulturalisme menjadi semacam respons kebijakan baru terhadap keragaman. Dengan kata lain, adanya komunitas-komunitas yang berbeda saja tidak cukup; sebab yang terpenting adalah bahwa komunitas-komunitas itu diperlakukan sama oleh negara.

Setelah tiga dekade sejak digulirkan (1970-an), multikulturalisme sudah mengalami dua gelombang penting yaitu, *pertama* multikulturalisme dalam konteks perjuangan pengakuan budaya yang berbeda. Prinsip kebutuhan terhadap pengakuan (*needs of recognition*) adalah ciri utama dari gelombang pertama ini.⁴ Gelombang *kedua*, adalah multikulturalisme yang melegitimasi keragaman budaya, yang mengalami beberapa tahapan, diantaranya: kebutuhan atas pengakuan, melibatkan berbagai disiplin akademik lain, pembebasan melawan imperialisme dan kolonialisme, gerakan pembebasan kelompok identitas dan masyarakat asli/masyarakat adat (*indigeneous people*), post-kolonialisme, globalisasi, post-nasionalisme, post-modernisme dan post-strukturalisme yang mendekonstruksi struktur kemapanan dalam masyarakat.⁵

Multikulturalisme gelombang kedua ini, pada gilirannya memunculkan dua tantangan yang harus diperhatikan sekaligus harus diwaspadai, yaitu, *pertama* adanya hegemoni Barat dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan ilmu pengetahuan. Komunitas, utamanya negara-negara berkembang, perlu mempelajari sebab-sebab dari hegemoni Barat dalam bidang-bidang tersebut dan mengambil langkah-langkah perlunya mengatasinya, sehingga dapat sejajar dengan dunia Barat. *Kedua*, esensialisasi budaya. Dalam hal ini multikulturalisme berupaya mencari esensi budaya tanpa harus jatuh ke dalam pandangan yang *xenophobia* dan etnosentrisme.⁶

Di lain pihak, multikulturalisme juga merupakan sebuah term yang berkembang dari istilah yang sebelumnya telah lebih dahulu mapan yaitu “pluralisme”, sehingga tak heran jika terdapat asumsi bahwa multikulturalisme merupakan kontinuitas dan penyempurnaan gagasan pluralisme. Pluralisme yang lebih dahulu

⁴ H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme; Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional* (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 83.

⁵ Gregory Jay. “Critical Contexts For Multiculturalism”
<http://www.uwm.edu/~gjay/Multicult/contextsmulticult.htm>.

⁶ H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme; Tantangan*, h. 84-85.

populer memang terkadang dikaitkan dengan semangat keagamaan protestanistik yang berbagai sekenya, terutama sekte Mormon, mendapat perlakuan kurang proporsional atau lebih kerasnya lagi mungkin dipandang sebagai diskriminasi dengan tidak diakuinya oleh geraja karena dianggap sebagai gerakan heterodoks. Diskriminasi tersebut berlangsung sampai ahir abad ke sembilan belas, ketika muncul protes keras dari presiden Amerika Serikat, Grover Cleveland (1837-1908).

Pluralisme yang sebelumnya memiliki pengertian netral yang secara etimologi berarti “paham tentang yang plural” merambah dalam pemikiran yang lebih pilosofis dan menembus wilayah sakral keagamaan. Secara terminologi pluralisme adalah ajaran bahwa kenyataan berdasarkan pelbagai asas yang masing-masing tidak berhubungan yang satu dengan yang lain; bahwa kenyataan (realitas) terdiri dari pelbagai unsur dasar, yang masing-masing berlainan hakikat pada yang satu dengan yang lain. Penganut pluralisme yang terkenal antara lain Lebniz sementara yang merupakan kebalikan pluralisme adalah monisme dan dualisme.⁷

Ketika pluralisme masuk ke wilayah sakral maka muncul apa yang disebut dengan istilah baru “pluralisme agama”. Gagasan pluralisme agama, sebagaimana dicatat oleh Anis malik Toha,⁸ merupakan salah satu elemen dari gerakan reformasi pemikiran agama atau liberalisasi agama yang dilancarkan oleh Gereja Kristen pada abad ke-19 dengan tokoh sentralnya Friedrich Schleiermacher. Gagasan pluralisme agama semakin kokoh dan berkembang dengan dikuatkan oleh wacana filsafat dan teologi Barat. Ernst Troeltsch (1865-1923), seorang teolog Kristen, dalam sebuah makalahnya yang berjudul “*Posisi agama Kristen di antara Agama-agama Dunia*” yang disampaikan dalam sebuah seminar di Universitas Oxford (1923) mengemukakan bahwa semua agama, termasuk krtisten, selalu mengandung elemen kebenaran dan tidak satu agama pun memiliki kebenaran mutlak. Konsep ketuhanan di muka bumi ini beragama dan tidak tunggal.

Dari gagasan pluralisme agama ini paling tidak bisa memunculkan tiga bentuk reaksi yang berbeda, yaitu: 1) *proselitisme*, adalah suatu usaha untuk mengajak agama lain ke

⁷ Hasan Sadili, *Ensiklopedi Indonesia: Edisi Khusus Jilid 5*, (Jakarta: PT. Inter Masa, 1990), h. 2727.

⁸ Anis Malik Toha, dalam “Melacak Pluralisme Agama”, dalam majalah “Swara Muslim” edisi online, <http://swaramuslim.net/comments.php?id=2166010C>

jalan agama yang dianggapnya benar; 2) *sinkritisme*, adalah reaksi kompromis dengan cara mencampuradukan kedua keyakinan agama tersebut (yang dianut dan dijumpainya); dan 3) *fundamentalisme*, yaitu reaksi menolak pluralism dengan memperkuat posisinya sendiri.⁹

Proselitisme merupakan fenomena yang terjadi dalam interaksi dengan agama-agama lain dimana seseorang dipaksa atau terpaksa untuk memeluk agama lain tersebut. Isu Islamisasi dan kristenisasi dipandang sebagai contoh-contoh untuk kasus ini.

Sementara sinkritisme adalah sebuah gejala dalam tradisi keagamaan yang berusaha untuk mencari hal-hal baik dari agama lain dan mencampuradukannya dalam tradisi keagamaan yang dianutnya. Kelihatannya reaksi ini lebih bersifat inklusif sehingga kerukunan agama berkembang meskipun ke arah yang relatif tidak jelas karena identitas awal dan identitas agama lain tercampuradukan. Memang diakui bahwa sifat sinkretisme ini membawa ke situasi yang lebih akur dan jauh dari konflik. Adakalanya dalam sinkritisme ini seseorang memetik kebaikan dari agama lain dan memasukan pada agamanya sendiri dengan tetap memeluk agamanya, tetapi adakalanya kedua agama itu diikuti bersama dan melebur.

Sedangkan fundamentalisme dianggap sebagai suatu reaksi yang menutup diri yang berusaha memurnikan ajaran agama dan menolak berhubungan dengan pihak luar yang kadang menimbulkan sikap eksklusifisme yang menjurus pada sikap absolut/mutlak dan tidak sedikit menjurus pada sikap militanisme. Atas konteks tersebut maka fundamentalisme ini bisa diklasifikasikan ke dalam fundamentalisme-eksklusif.

Mungkin dari sinilah jika kita jumpai bahwa berbagai respon muncul terutama dari agamawan-agamawan yang tidak menyetujui gagasan pluralisme agama tersebut karena dipandang akan merusak dan menghancurkan pondasi keimanan seseorang yang beragama. Oleh sebab itu munculnya gagasan multikultural yang cakupannya lebih komprehensif juga mendapat reaksi yang tidak sedikit dari para agamawan. Oleh karena diperlukan sebuah rumusan yang dipandang tepat untuk mempromosikan gagasan tersebut.

⁹ Gustiana Isya Marjani, "Religious Tolerance of The Muslim Society Toward Plurality of Religion: an Indonesian Experience", dalam Jurnal Ilmu Agama Islam "Khazanah", vol.3, No. 10, Juli-desember, 2006.

Konteks Indonesia

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai kelompok etnis, budaya, agama dan lain-lain sehingga negara-bangsa Indonesia secara sederhana dapat disebut sebagai masyarakat "multikultural". Oleh sebab itu tidak berlebihan jika JS Furnivall memperkenalkan masyarakat Asia Tenggara dan terutama Indonesia sebagai contoh negara majemuk dalam model politik multikultural ke dunia Barat.

Furnivall juga memberikan definisi tentang "masyarakat plural" sebagai masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih unsur-unsur atau tatanan-tatanan sosial yang hidup berdampingan, tetapi tidak bercampur dan menyatu dalam satu unit politik tunggal.¹⁰ Dalam konteks Indonesia bisa jadi mungkin lebih dari syarat untuk sebuah masyarakat plural, karena pluralnya benar-benar paling majemuk di dunia. Bahkan tidak ada satu negara pun yang bisa menandingi banyaknya budaya yang ada di negara ini. Berdasarkan pengalaman politik Eropa yang relatif homogen Furnivall mengkhawatirkan jika suatu ketika terjadi sindrom Balkanisasi di wilayah Asia Tenggara jika gagal menemukan formula federasi pluralis yang tepat.

Munculnya gagasan Bhineka Tunggal Ika sebagai moto dan kesepakatan bersama bangsa ini merupakan bagian lain dari kesadaran multikulturalisme. Jika kita temukan di Eropa dan Kanada atau Amerika Serikat kesadaran ini baru berkembang pasca PD II, sesungguhnya bagi bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang telah menjadi bagian dari jiwa bangsa ini jauh sebelum merdeka. Kemudian setelah kemerdekaan baru dikuatkan menjadi semboyan yang disepakati. Karena memang bangsa ini dibentuk oleh kultur yang beragam yang telah lama eksis. Peristiwa Sumpah Pemuda 1928 merupakan bukti bahwa beragamnya bangsa Indonesia yang mencari titik temu kesadaran bersama untuk mengesampingkan perbedaan demi tujuan yang lebih besar, sebagai bentuk kesadaran multikultural yang baru disadari Eropa, Kanada dan Amerika belakangan.

Pembentukan masyarakat multikultural Indonesia yang sehat tidak bisa secara *taken for granted* atau *trial and error*, melainkan harus diupayakan secara sistematis, programatis, *integrated* dan berkesinambungan, dan bahkan perlu percepatan (akselerasi). Salah satu strategi penting dalam mengakselerasikannya adalah pendidikan multikultural yang diselenggarakan melalui seluruh

¹⁰ Furnivall, *Memorandum on reconstruction problems in Burma*, (New York: International Secretariat, Institute of Pacific Relations, 1944), h. 446.

lembaga pendidikan, baik formal ataupun non-formal, dan bahkan informal dalam masyarakat luas. Statement ini menguatkan betapa pentingnya pendidikan dalam mentransformasi nilai multikultural dalam masyarakat.

Gambaran Global tentang Pendidikan

Secara sederhana, paling tidak terdapat empat definisi yang bisa memberikan gambaran tentang pendidikan. *Pertama*, Pendidikan merupakan upaya nyata untuk memfasilitasi individu lain, dalam mencapai kemandirian serta kematangan mentalnya. *Kedua*, Pendidikan adalah bimbingan dan arahan dari orang dewasa kepada orang lain, untuk menuju kearah kedewasaan, kemandirian serta kematangan mentalnya. *Ketiga*, Pendidikan merupakan aktivitas untuk melayani orang lain dalam mengeksplorasi segenap potensi dirinya, sehingga terjadi proses perkembangan kemanusiaannya agar mampu berkompetisi di dalam lingkup kehidupannya (Insan Cerdas dan Kompetitif). *Keempat*, pendidikan adalah usaha sadar yang sistematis dalam mengembangkan seluruh potensi (fitrah) yang ada dalam diri manusia untuk menjadi manusia yang seutuhnya (insan kamil).

Dalam proses penyelenggaraannya, dikenal berbagai macam bentuk pendidikan yaitu pendidikan formal, nonformal dan informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Sedangkan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.¹¹

Sementara itu pendidikan formal atau sitem pendidikan melalui bangku sekolah diyakini mempunyai peran yang amat vital dalam pembentukan perkembangan potensi manusia secara maksimal. Dari pendidikan formal ini terdapat beberapa indikator

¹¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan>

yang bisa dicapai anak didik, diantaranya: memiliki ketajaman respon terhadap lingkungannya, memiliki daya intelektual yang kuat, keterampilan, motivasi, mampu menjadi kompetitor, bisa bekerjasama, toleran, mampu menghargai perbedaan dan masih banyak lagi hal positif yang bisa diraih.

Selanjutnya perlu dicatat, bahwa para ahli membuat batasan tentang pendidikan yang beragam dengan kandungannya yang berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut merupakan suatu kewajaran yang mungkin terjadi karena berbagai faktor, diantaranya karena orientasi, konsep dasar yang digunakan, aspek yang menjadi tekanan ataupun falsafah yang melandasinya. Oleh karenanya muncul berbagai fungsi pendidikan ini diantaranya: sebagai proses transformasi budaya, sebagai proses pembentukan pribadi, sebagai proses penyiapan warga Negara atau pun juga sebagai proses penyiapan tenaga kerja.

Pendidikan sebagai proses transformasi budaya karena pendidikan diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi karena pendidikan berfungsi sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. Pada kenyataan proses pembentukan kepribadian ini berlangsung untuk dua sasaran yaitu mereka yang belum dewasa oleh yang sudah dewasa, dan bagi mereka yang sudah dewasa atas usaha sendiri. Sedangkan pendidikan sebagai proses penyiapan warga Negara diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga Negara yang baik. Demikian, pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. Pembekalan dasar tersebut berupa pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan kerja pada calon lulusan.

Dengan demikian kita bisa memformulasikan bahwa tujuan pendidikan itu paling tidak harus memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar dan indah untuk kehidupan. Untuk lebih sedikit memperjelas tentang jenis pendidikan ini, tulisan berikut selanjutnya diarahkan untuk melihat perkembangan pendidikan dalam mentransformasi wacana multikultural yang berimbas pada lahirnya pendidikan multikultural.

Lahirnya Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural hadir berawal dari berkembangnya gagasan dan kesadaran tentang “interkulturalisme” sesudah Perang

Dunia II sebagai imbas dari gelombang besar imigrasi warga bangsa-bangsa baru ke Eropa dan Amerika. Di Amerika sendiri berkembang konsep pendidikan interkultural dan interkelompok (*inter-cultural and inter-group education*). Pada dasarnya pendidikan *intercultural* merupakan *cross-cultural education* yang bertujuan mengembangkan nilai-nilai universal yang dapat diterima berbagai kelompok masyarakat berbeda.

Pada tahap awal pendidikan interkultural dimaksudkan sebagai media untuk merubah perilaku individu agar tidak meremehkan ataupun melecehkan budaya atau kelompok lain, khususnya dari kalangan minoritas. Di samping agar tumbuhnya toleransi dalam diri seseorang terhadap berbagai perbedaan budaya, ras, etnis serta agama dan lainnya. Tetapi dalam kenyataannya ketika konflik dalam skala luas terjadi bukan pada tingkat individu melainkan dalam masyarakat sehingga mengganggu hubungan bersama antar warga ataupun negara dan bangsa. Oleh karenanya pendidikan interkultural ini dipandang kurang berhasil sehingga muncul gagasan baru tentang pendidikan multikultural.

Pendidikan multikultural memandang masyarakat secara lebih luas lagi. Berawal dari pandangan dasar bahwa sikap *indifference* dan *non-recognition* berakar tidak hanya dari ketimpangan struktural rasial, maka paradigma pendidikan multikultural mencakup hal-hal tentang ketidakadilan, kemiskinan, penindasan dan keterbelakangan kelompok-kelompok minoritas dalam berbagai bidang; sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan lain-lain.

Seperti Azyumardi Azra menggariskan bahwa istilah “pendidikan multikultural” dapat digunakan pada tingkat deskriptif ataupun normatif, yang menggambarkan isu-isu dan masalah-masalah pendidikan berkaitan dengan masyarakat multikultur. Dalam konteks deskriptif dan normatif ini, maka kurikulum pendidikan multikultural harus mengcover subjek-subjek seperti: toleransi; tema-tema tentang perbedaan etno-kultural, dan agama; bahaya diskriminasi; penyelesaian konflik dan mediasi; HAM; demokrasi dan pluralitas; kemanusiaan yang universal, dan subjek-subjek lain yang relevan.¹²

¹² Azra, “*Keragaman Indonesia Pancasila dan Multikulturalisme*”, makalah yang disampaikan pada Semiloka Nasional Fakultas Psikologi UGM dengan Institute for Community Behavioral Change (ICBC) dan Konrad Adenauer Stiftung (KAS) di Yogyakarta 13 Agustus 2007.”

James A. Banks memberikan pengertian tentang Pendidikan Multikultural sebagai konsep, ide atau falsafah sebagai suatu rangkaian kepercayaan (*set of believe*) dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis di dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan-kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun Negara.

Multikulturalisme Islam

Secara sederhana kita melihat bagaimana pengakuan para akademisi Barat terhadap konteks sejarah umat Islam ketika pada era awal masa Muhammad saw. di Madinah dipandang sebagai sebuah peradaban modern yang luar biasa maju. Nilai-nilai universal yang saat ini disuarakan dunia tentang keragaman (*pluarality*), kesetaraan (*equality*), kemanusiaan (*humanity*), keadilan (*justice*) dan nilai-nilai demokrasi (*democratization value*), pada prinsipnya semua itu merupakan bagian peradaban Islam yang dipresentasikan Muhammad saw di eranya. Piagam Madinah menjadi piagam tertua di dunia yang menata kehidupan masyarakat multikultur pada waktu itu di saat tidak satu pun peradaban bisa melakukannya.

Tidak berhenti sampai di sana ketika umat Islam sampai ke Eropa, kembali akademisi Barat memuji keberhasilan Islam meletakkan nilai-nilai yang dianggap saat ini sebagai etika peradaban modern pada masyarakat Eropa yang saat itu di huni oleh tiga agama besar. Islam lagi-lagi menempatkan wilayah Eropa satu tempat tidur untuk tiga agama.

Munculnya gerakan baru dalam kelompok Islam progresif yang memandang kemajuan dan kemodernan umat Islam di era Madinah perlu direaktualisasikan kembali saat ini, menunjukkan bahwa klaim-klaim terminologi modern bukan sesuatu yang *incompatible* bagi umat Islam. Kalaulah Komisi dunia untuk Kebudayaan dan Pembangunan, menyebut perlunya diciptakan “global *ethic*” yang didasarkan atas elemen-elemen: 1) hak azasi manusia dan tanggung jawab; 2) demokrasi dan elemen masyarakat madani; 3) perlindungan terhadap golongan minoritas; 4) komitmen terhadap pemecahan konflik secara damai; 5) kesamaan dan kesetaraan dan antar generasi, dalam pandangan Islam progresif kita perlu untuk mengapresiasinya.

Namun demikian kita juga perlu mendiskusikannya dengan tidak menelan mentah-mentah dari apa yang digagas para akademisi dunia saat ini. Syah saja jika pada dataran tertentu umat

Islam ada yang keberatan dengan term-term atau gagasan-gagasan yang muncul di era modern tersebut, sehingga pada akhirnya dunia pun harus menghargai perbedaan dalam umat Islam sebagai bentuk keragaman. Maka moto *agree in disagreement* mungkin harus disadari sebagai salah satu solusi dalam menghindari konflik.

Kesimpulan

Multikulturalnya umat manusia merupakan *sunatullah* yang tidak bisa dihindarkan. Tugas umat manusia bukan untuk menghilangkan keragaman ini dengan menjadikannya keseragaman melainkan bagaimana kita sebaiknya bersikap dan memaknainya. Sebagai umat beragama dengan panduan Illahi tentunya hanya *guide line* Illahi pulalah yang dijadikan panduan dalam bersikap. Bagi umat Islam sangat jelas bahwa panduan yang harus diikuti adalah Al Qur'an dan Hadits sebagai dua sumber utama ajaran Islam di samping juga *Qiyas* atau pun *Ijma* bagi sebagian yang meyakiniya atau bahkan hasil *Ijtihad* para ulama.

Kalau seandainya dalam memahami multikultur ini kita menemukan pandangan yang berbeda dalam mensikapinya yang terjadi mungkin karena pemahaman dari interpretasi dengan metode yang berbeda pula, sebaiknya perbedaan pemahaman tersebut menjadi rahmat untuk saling memahami dan belajar dari perbedaan itu.

Daftar Pustaka

- Furnivall, *Memorandum on reconstruction problems in Burma*, New York: International Secretariat, Institute of Pacific Relations, 1944.
- Jay, Gregory,. “Critical Contexts For Multiculturalism” <http://www.uwm.edu/~gjay/Multicult/contextsmulticult.htm>.
- Lash Scott, dan Mike Featherstone (ed.), *Recognition And Difference: Politics, Identity, Multiculture*, London: Sage Publication, 2002.
- Marjani, Gustiana Isya, “Religious Tolerance of The Muslim Society Toward Plurality of Religion: an Indonesian Experience”, “*Khazanah*” vol.3, No. 10, Juli-desember, 2006.

Ridwan, M. Deden, *Membangun Kerukunan Teologi; Kehampaan Spiritual Masyarakat Indonesia*, Jakarta:Media Cita, 2000.

Sadili, Hasan, *Ensiklopedi Indonesia: Edisi Khusus Jilid 5*, Jakarta: PT. Inter Masa, 1990.

Tilaar, H.A.R. *Multikulturalisme; Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Grasindo, 2002.

Thohari, Harjiyanto Y. *Islam dan Realitas Budaya*, Jakarta: Media Cita, 2000.

Toha, Anis Malik, dalam “Melacak Pluralism Agama”, dalam majalah “*Swara Muslim*” edisi online, <http://swaramuslim.net/comments.php?id=2166010C>